

MASA DEPAN PENDIDIKAN INKLUSI

Oleh:

Suradi

Program PPG PAI SD. Email: pakradeelee@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk memajukan peradaban manusia adalah dengan pendidikan. Pendidikan menjadi penting karena dengannya manusia akan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan inklusi, hak untuk memperoleh layanan pendidikan tidak hanya dimiliki oleh anak-anak yang normal, anak berkebutuhan khusus (ABK) juga berhak mendapatkannya.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendorong masyarakat terutama sekolah untuk dapat memberikan layanan pendidikan kepada semua anak tanpa kecuali. Dorongan inilah yang dikenal dengan program pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Permendiknas No.70 tahun 2009 pasal 4 (1) menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta

didik berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 1).

Pada kenyataannya, sekolah-sekolah Yogyakarta yang menjadi sekolah inklusi masih mengalami beragam kendala dalam pelaksanaannya. Sekolah-sekolah inklusi, harus mampu melayani anak berkebutuhan khusus. Padahal dari berbagai segi, masih terdapat kekurangan disana-sini.

Dalam pembelajaran misalnya, guru-guru tidak ada yang berlatarbelakang pendidikan ke-LB-an, jadi dalam menangani anak berkebutuhan khusus dan mendesign pembelajaran di kelas yang ada anak berkebutuhan khususnya menjadi tidak maksimal. Seorang guru yang berlatar belakang pendidikan matematika harus mampu memberikan layanan kepada ABK yang mengalami gangguan pendengaran dan bicara misalnya. Dan masih banyak ditemukan berbagai kendala dan ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan diinginkan pemerintah, dengan kondisi riil di sekolah.

Dari segi kurikulum juga masih menggunakan kurikulum reguler, sehingga sebagian dari anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan menyesuaikan dengan materi yang banyak tidak difahaminya. Dan berbagai persoalan terkait dengan pendidikan inklusif.

Dengan melihat kondisi sebagaimana disebutkan di atas maka penulis berasumsi bahwa masih perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus atas urgensi penyelenggaraan sekolah inklusi di Yogyakarta.

2. Identifikasi Masalah

Dari berbagai permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas

maka masalah yang ada pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta adalah

- a. pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi di sekolah-sekolah di Yogyakarta masih belum maksimal.
- b. pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi di sekolah-sekolah di Yogyakarta perlu dilakukan pembenahan.
- c. sekolah-sekolah di Yogyakarta belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi yang ditetapkan pemerintah.
- d. masih ditemukan diskriminasi perlakuan terhadap anak berkebutuhan khusus, baik dari teman, guru maupun sekolah.
- e. sekolah-sekolah di Yogyakarta mengalami kendala-kendala yang bersifat teknis maupun non teknis.

3. Urgensi Pembahasan

Dengan kata lain, pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pendidikan inklusif adalah suatu komitmen untuk melibatkan siswa-siswi yang memiliki hambatan dalam setiap tingkat pendidikan mereka yang memungkinkan (Denis, Enrica, 2006). Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan dengan melakukan adaptasi terhadap delapan standar nasional pendidikan, yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik/tenaga kependidikan, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Proses adaptasi tersebut mencakupi kegiatan mengorganisasikan (organizing), mengarahkan (directing), mengkoordinasikan (coordinating), mengawasi (controlling), dan mengevaluasi

(evaluation), hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dalam konteks aplikatif, usaha untuk memberikan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), kegiatan pembelajaran dalam kelas-kelas inklusi harus tercipta suasana belajar yang kooperatif antara siswa-siswa biasa dengan siswa yang berkebutuhan khusus.

Selain itu, anak-anak biasa harus dikondisikan untuk memiliki sikap empati terhadap anak yang membutuhkan pendidikan khusus, agar ABK merasa nyaman belajar bersama-sama dengan anak-anak sebaya lainnya, yang akhirnya tidak merasa inferior (rendah diri).

B. PEMBAHASAN

Istilah inklusif adalah falsafah pendidikan dan menjadi bagian dari keseluruhan, dimana anak-anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak yang berkelainan. Landasan yuridis mengenai pendidikan inklusi yakni sebagai berikut:

1. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31

Ayat (1) “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Ayat (2) “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa ada diskriminasi baik secara fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya dan hal tersebut dapat terwujud melalui sistem pendidikan wajib 9 tahun. Penyelenggaraan pendidikan akan dapat dilaksanakan secara maksimal apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.

2. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa pendidikan diharapkan dapat menjadi upaya dalam membentuk manusia Indonesia yang memiliki potensi disegala bidang sehingga nantinya dapat menjadi motor penggerak bagi kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Sumber Daya Manusia yang unggul ini nantinya dapat membawa bangsa menuju ke dalam masyarakat yang mampu bersaing di dunia Internasional. Pasal 5 Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ayat (2): Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat (4): Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Pendidikan diselenggarakan tanpa ada diskriminatif baik bagi anak yang berkelainan maupun bagi anak normal. Pendidikan tersebut diselenggarakan melalui pendidikan khusus. Pasal 32 Ayat (1): Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan. Ayat (2): Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik didaerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Pasal ini menjelaskan bahwa pendidikan khusus adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi semua siswa. Pendidikan

khusus bukan hanya diperuntukan bagi siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan, namun juga bagi masyarakat adat yang terpencil, dan/ atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Bab X – Kurikulum Pasal 36 Ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.

Dalam pasal 36 ayat (3) dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan disusun dengan memperhatikan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa harus terbebani dengan berbagai kebijakan yang mengikat.

Dalam bab XII – Sarana-Prasarana Pendidikan, pasal 45 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Dalam pasal 45 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal seyogyanya dapat menyediakan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran. Sarana prasarana tersebut hendaknya dapat memenuhi kebutuhan mereka, disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Pasal 51 Anak penyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 51 menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya untuk sebagian orang saja, tetapi untuk semua orang. Dalam hal ini termasuk

bagi anak penyandang cacat juga diberi kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan tersebut bisa diperoleh di sekolah umum maupun di sekolah luar biasa.

Pasal 52 Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa tiap anak memiliki keunggulan dan prestasi baik dibidang akademis maupun bidang lainnya, berhak memperoleh kesempatan dan aksesibilitas dalam memperoleh pendidikan khusus. Mereka diberikan suatu pelayanan khusus sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasinya.

Pada pasal 53 juga disebutkan, a) Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dan keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. b) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Dalam pasal 53 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan dan pembiayaan pendidikan. Bantuan pelayanan dan pembiayaan pendidikan diberikan kepada mereka yang kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Hal ini dimaksudkan agar masalah pendidikan yang dalam hal ini mengenai masalah pelayanan dan pembiayaan tidak menjadi sebuah kendala untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat diharapkan dapat ikut termotivasi dalam menyukseskan pelaksanaan pendidikan.

b. UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal 5 Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C8/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003. Perihal

pendidikan inklusi : menyelenggarakan dan mengembangkan disetiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, dan SMK.

Dari pasal tersebut diatas dijelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu layanan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak yang memiliki kelainan untuk bisa belajar bersama dengan siswa normal di kelas reguler. Pendidikan inklusif ini seyogyanya diselenggarakan disetiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 sekolah.

- c. Deklarasi Bandung (Nasional) ”Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” 8-14 Agustus 2004
- 1) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi yang handal.
 - 2) Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merupakan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.
 - 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
 - 4) Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.

- 5) Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun pro aktif dengan siapapun, kapanpun, dan di lingkungan manapun dengan meminimalkan hambatan.
 - 6) Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan dan lainnya secara berkesinambungan.
 - 7) Menyusun Rencana Aksi (*action plan*) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan berkebutuhan khusus lainnya.
- d. Deklarasi Bukit Tinggi (Internasional) Tahun 2005
1. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk “Pendidikan untuk semua” adalah benar-benar untuk semua.
 2. Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan anak usia dini, prasekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi.
 3. Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga Negara. Secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan bulan Juni 1994 bahwa “prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-

sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka”.

Pendidikan inklusif memiliki visi dan misi. Visi pendidikan inklusif adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang optimal untuk mencapai kemandirian bagi anak-anak berkelainan dan berkebutuhan khusus lainnya serta anak-anak yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Misi dari pendidikan inklusif itu sendiri adalah memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi anak yang berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, meningkatkan kepedulian dan memperluas jaringan tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, dan mewujudkan pendidikan inklusif secara baik dan benar di lingkungan masyarakat.

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena memudahkan guru dan administrator. Namun jika dilihat dari segi peserta didik, sangat merugikan.

Disebutkan oleh Reynolds dan Birch (1988), antara lain bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak yang berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara filosofis model segregasi tidak logis, karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berorientasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka dipisahkan dari komunitas masyarakat biasa. Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa model segregatif relatif mahal.

Pada pertengahan abad XX model yang muncul adalah model *mainstreaming*. Model ini memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. Alternatif yang

tersedia mulai dari yang sangat bebas (kelas biasa penuh) sampai yang paling terbatas (sekolah khusus sepanjang hari), model ini juga dikenal dengan model paling tidak terbatas (*the least restrictive environment*), artinya seorang anak berkelainan harus ditempatkan pada lingkungan yang paling tidak terbatas menurut potensi dan jenis/tingkat kelainannya.

Pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan pendidikan yang layak bagi, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.

Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak bisa diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan dapat saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lainnya. Lain halnya dengan pendapat Staup dan Peck (1995) yang mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan kelas yang relevan bagi anak yang berkelainan. Sementara Sapon (1995) mengatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman sebayanya. Oleh karena itu, ditekankan adanya rekonstruksi dari sekolah, sehingga menjadi suatu komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi/kelas inklusif yaitu sistem pendidikan atau kelas dimana setiap anak berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa dapat belajar bersama dengan anak normal lainnya dalam satu kelas untuk dididik bersama agar dapat mengoptimalkan potensi yang

dimilikinya. Hal ini dilandasi bahwa pada kenyataannya anak normal dan anak berkelainan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian Sapon- Shevin, ada lima profil pembelajaran di kelas inklusif antara lain sebagai berikut.

- a. Pendidikan Inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, dimana guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas dimana anak ditampung secara penuh dengan menekankan saling menghargai perbedaan.
- b. Mengajar kelas heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar.
- c. Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif.
- d. Pendidikan inklusif berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi, karena aspek terpenting dari pendidikan inklusif adalah pengajaran tim, kolaborasi dan konsultasi dengan berbagai cara mengukur ketrampilan, pengetahuan dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak.
- e. Pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.

Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model antara lain

- a. kelas reguler (inklusif penuh) yaitu anak berkelainan bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler belajar dengan menggunakan kurikulum yang sama,
- b. kelas reguler dengan cluster yaitu anak berkelainan bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus,
- c. kelas reguler dengan *pull out* yaitu anak berkelainan bersama anak normal di kelas reguler namun dalam waktu-

waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus,

- d. kelas reguler dengan cluster dan *pull out* yaitu anak berkelainan bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang belajar lain dengan guru pembimbing khusus,
- e. kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian yaitu anak yang berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler,
- f. kelas khusus penuh yaitu anak berkelainan belajar dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berada dalam kelas reguler setiap saat. Setiap sekolah atau kelas inklusif dapat memilih model mana yang diterapkan terutama tergantung kepada jumlah anak yang berkelainan, jenis kelainan, tingkat kelainan, ketersediaan tenaga pengajar dan sarana prasarana yang tersedia.

Sementara itu mutu lulusan dipengaruhi oleh proses belajar-mengajar dan mutu belajar-mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain diantaranya input siswa, kurikulum, tenaga pengajar, sarana-prasarana, dana, manajemen dan lingkungan.

Dari kesemuanya itu merupakan sub-sistem dalam sistem pendidikan dan bila ada perubahan pada salah satu sub-sistem, maka menuntut perubahan komponen lainnya. Oleh karena itu kelas inklusif merupakan salah satu bentuk pemerataan pendidikan bagi anak yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa agar bisa memperoleh kesempatan pendidikan dengan anak normal lainnya karena tidak dapat dipungkiri bahwa mereka merupakan bagian integral dari masyarakat. Keberhasilan utama dari pendidikan

inklusif yaitu apabila ada kepedulian dari semua pihak serta adanya kerjasama dari semua pihak.

Penelitian tentang pendidikan inklusi pernah dilakukan di Yogyakarta antara lain tesis dengan judul, **EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA** yang disusun oleh Terry Irenewaty dan Aman.

Hasil penelitian tesis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada standar/kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tergantung dari kesediaan sekolah itu sendiri. Pendidikan inklusif bisa diselenggarakan kalau sekolah merasa siap dan mampu menyelenggarakannya.

Dinas pendidikan atau pemerintah tidak pernah memaksakan suatu sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Peranan Dinas Pendidikan Propinsi DIY sendiri adalah sebagai sentra pembina pelaksanaan pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan mengusahakan guru khusus (guru pendidikan luar biasa) dan mendidik guru PLB agar siap diterjunkan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, selain itu Dinas Pendidikan juga mendidik guru-guru umum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka lebih siap dalam mendidik siswa dikelas inklusif yang notabene mempunyai siswa heterogen.

Kendala-kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada empat. *Pertama*, kendala yang sifatnya praktis sebagai contoh kondisi geografis, saranaprasarana, dan kondisi keuangan. *Kedua*, yaitu psikologi baik dari masyarakat maupun guru. *Ketiga*, value yaitu penilaian/persepsi negatif masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Keempat*, power yaitu hambatan-hambatan dari penguasa, misalnya penguasa membuat kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa.

Upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu dengan melakukan sosialisasi keberbagai daerah mengenai pendidikan

inklusif agar semua orang mengetahui dan paham mengenai pendidikan inklusif, sehingga tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki kelainan (cacat).

Pendidikan inklusif sebagai salah satu bentuk sekolah dimana anak-anak berkelainan mempunyai kesempatan belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya. Pendidikan inklusif telah menjadi wahana baru bagi anak-anak berkelainan atau anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk meningkatkan potensi yang dimiliki tanpa harus dipisahkan dari masyarakat normal pada umumnya. Mereka pada dasarnya juga warga negara Indonesia yang juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Di kelas inklusif ini, sistem pendidikan menjadi sorotan utama dimana dalam sistem pendidikan ini, daya kreativitas dan inovasi pendidikan perlu dilakukan. Bukan hanya itu saja peran guru dan unsur-unsur penunjang pendidikan lainnya perlu mendapat perhatian untuk memperoleh hasil lulusan atau mutu lulusan yang dapat bersaing di dunia pendidikan sehingga pemerataan pendidikan bagi anak-anak berkelainan atau anak yang memiliki kecerdasan luar biasa.

Latar belakang guru dan siswa yang berbeda-beda baik secara pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan agama juga akan berpengaruh terhadap proses dan hasil dari kegiatan pembelajaran baik positif maupun negatif. Jika sikapnya positif maka aktivitasnya pun tinggi, namun sebaliknya jika negatif maka aktivitasnya cenderung rendah.

Dari berbagai aktivitas yang terjadi selama proses pendidikan akan diketahui hasil dari pendidikan tersebut sehingga dapat diketahui apakah tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal atau tidak. Dengan demikian, maka tepat apabila untuk melihat dan menemukan realitas yang sesungguhnya dari implementasi kelas inklusif ini dimulai dari menilai konteks-input-proses-output.

C. KESIMPULAN

Pendidikan inklusif ini merupakan terobosan baru untuk mengatasi masalah pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa tanpa harus ada segregasi atau pemisahan dengan anak normal lainnya. Hal yang dikaji di sini adalah bahwa keberadaan kelas inklusif dapat menciptakan suatu sistem pendidikan moral bagi siswa agar mampu mengkondisikan diri terhadap lingkungan yang kompleks dimana keberagaman karakteristik siswa bisa membawa kearah pendidikan budaya baru yang lebih modern.

Untuk itu, diperlukan model belajar mengajar dan sistem evaluasi yang impresif agar tujuan pendidikan inklusif secara substansial dapat tercapai. Adapun rencana yang diusulkan dari hasil penelitian ini adalah diperluasnya akses pembelajaran inklusif untuk memberikan pelayanan pendidikan secara meluas terhadap Anak Berkebutuhan Khusus, tanpa ada diskriminatif. Bentuk-bentuk atau usaha-usaha sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi anak yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa telah banyak dilakukan. Salah satunya dengan adanya pendidikan inklusif.

Untuk mewujudkan hal tersebut seperti apa yang menjadi tujuan UU Sisdiknas 2003, maka perlu kerjasama dari berbagai elemen pendidikan. Di tingkat sekolah, kepala sekolah sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dalam program pendidikan. Program pendidikan di tingkat sekolah ini akan terlaksana apabila didukung oleh kesiapan input seperti halnya motivasi siswa dan guru, kurikulum pembelajaran, serta sarana pembelajaran yang memadai yang akan menjadi penunjang dalam proses pembelajaran.

Memang, kebijakan inklusif telah membuka belenggu dan memberi secercah harapan kehidupan baru bagi pelayanan pendidikan siswa-siswi berkebutuhan khusus. Namun demikian, pelaksanaan inklusif tidak serta merta dapat terwujud dengan baik tanpa didukung faktor-faktor lain dalam pengembangannya. Seperti yang dikemukakan Skjorten (2003:50), bahwa pelaksanaan inklusif membutuhkan:

1. Perubahan hati dan sikap;
2. Reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pengajaran, dan manajemen kelas termasuk penyesuaian lingkungan;
3. Redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia;
4. Redefinisi peran SLB yang ada, misalnya dapatkah sekolah-sekolah ini secara bertahap mulai berfungsi sebagai pusat sumber yang ekstensif?;
5. Penyediaan bantuan profesional bagi para guru dalam bentuk pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala sekolah dan guru kelas, sehingga mereka juga akan dapat memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusif dan bersikap fleksibel jika diperlukan;
6. Pembentukan, peningkatan, dan pengembangan kemitraan antara guru dan orang tua, demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan serta pertukaran pengalaman, bantuan dan nasihat.

Kebutuhan di atas menunjukkan perlunya kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Inklusif tidak cukup dengan sosialisasi dan pembuatan kebijakan-kebijakan saja. Hal yang paling mendasar adalah inklusif harus terinternalisasi terlebih dahulu dalam diri individu yang akan mengembangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Patton, M.Q. 1980. Qualitative evaluation methods. Beverly Hills, CA.: Sage Publication.
- S. Nasution, 1992, Metode penelitian naturalistik kualitatif, Bandung : Tarsito.
- Bimo Walgito, 1995, Bimbingan dan penyuluhan di sekolah, Yogyakarta : Andi Offset.
- Sumanto, 1995, Metodologi penelitian sosial dan pendidikan, Yogyakarta : Andi Offset.
- Nurul Zuriah, 2007, Metodologi penelitian sosial dan pendidikan, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang: Sistem pendidikan nasional, Jakarta: Depdiknas, 2003.